



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BENYAMIN DAVNIE
2. Jabatan : WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 59983

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.150.000.000

1. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , WARISAN Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 545.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
2. MOBIL, HONDA CIELO SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOBIL, MERCY SEDAN Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 306.789.706

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.001.789.706

III. HUTANG Rp. 140.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.861.789.706

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.